

**Analisis Keberlanjutan Kebijakan Ekonomi “America First”  
pada Pemerintahan Presiden Biden Terhadap  
Perekonomian Amerika Serikat**

An Analysis of the Sustainability of the “America First” Economic Policy Under the  
President Biden Administration on the United States Economy

✉ **Aulia Fauziah Aldi**

Universitas Indonesia, Indonesia

**ARTICLE INFO**

*America First,  
Proteksionisme,  
Presiden Joe Biden,  
Kebijakan Ekonomi,  
Amerika Serikat,  
US-China Trade.*

*Article History:*

Received : April 21, 2025

Accepted : June 13, 2025

Publish : Dece 20, 2025

**ABSTRAK:**

*Presiden Biden memutuskan melanjutkan beberapa elemen proteksionis dari kebijakan ekonomi “America First” dengan pendekatan lebih diplomatis, yang semakin jelas terlihat setelah satu tahun menjabat. Keputusan ini bertentangan dengan janji kampanyenya yang mengkritik kebijakan proteksionisme Presiden Trump dan berjanji akan melakukan perubahan dengan memperkuat sistem perdagangan multilateral. Namun, data dari CBP adanya peningkatan total impor ke Amerika Serikat, sehingga penting untuk dipahami lebih dalam alasan dibalik keputusan tersebut. Dengan menggunakan teori Neoclassical Realism oleh Gideon Rose, penelitian ini akan melihat bagaimana persepsi elite melihat masalah sistem internasional dan domestik dapat mempengaruhi keberlanjutan kebijakan ekonomi “America First” sebagai respons terhadap ancaman yang diterima. Penelitian ini berargumen bahwa adanya pengaruh dari variabel-variabel tersebut menjadikan kebijakan ekonomi yang dilakukan Presiden Biden berbeda dengan janji kampanyenya. Temuan utama menunjukkan bahwa keputusan Presiden Biden mempertahankan proteksionisme ini merupakan respons terhadap dinamika global, terutama persaingan dengan China dan kondisi domestik, meskipun dilakukan dengan pendekatan polite protectionisme.*

**ABSTRACT:**

*After one year, it has become increasingly apparent that President Biden intends to continue some elements of the protectionist “America First” economic policy with a more diplomatic approach. This decision contradicts his campaign promise to criticize President Trump’s protectionist policies and his pledge to strengthen the multilateral trading system. However, data from the CBP shows an increase in total imports to the United States, making it important to understand the reasons behind this decision. Using Gideon Rose’s neoclassical realism theory, this study examines how elite perceptions of international and domestic issues influence the sustainability of the “America First” economic policy in response to perceived threats. The study argues that these variables influence President Biden’s economic policies, making them different from his campaign promises. The main findings show that President Biden’s decision to maintain protectionism is a response to global dynamics, particularly competition with China, as well as domestic conditions. However, it is implemented through a polite protectionism approach.*

**How to Cite:**

Aldi, A. F. (2025). Analisis Keberlanjutan Kebijakan Ekonomi “America First” pada Pemerintahan Presiden Biden Terhadap Perekonomian Amerika Serikat. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(2), 133-146. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i2.841>.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota  
Depok, Jawa Barat, 16424

Email : [aulia.fauziah31@ui.ac.id](mailto:aulia.fauziah31@ui.ac.id)

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a  
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 133-146

## PENDAHULUAN

Kebijakan ekonomi merupakan elemen penting dalam hubungan internasional, tidak hanya untuk kepentingan domestik, tetapi juga penting dalam perdagangan internasional dan stabilitas politik-ekonomi global. Hal ini membuat proteksionisme dalam kebijakan ekonomi suatu negara menjadi isu politik yang penting di banyak negara. Proteksionisme dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi perekonomian nasional suatu negara, tergantung implementasinya. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang menerapkan proteksionisme paling mencolok dengan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Trump pada tahun 2017 yaitu “*America First*” serta beberapa keberlanjutannya yang dapat ditemukan dalam kebijakan ekonomi Presiden Biden.

Kebijakan “*America First*” merupakan kebijakan perdagangan dan ekonomi yang memprioritaskan kepentingan ekonomi, warga negara, keamanan, dan kedaulatan Amerika Serikat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong revitalisasi Amerika Serikat yang ditandai dengan rantai pasokan yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang masif, inflasi yang secara historis rendah, serta Presiden Trump merancang penghapusan defisit perdagangan yang menurutnya merugikan bagi perekonomian Amerika Serikat (Trump, 2017). Akan tetapi, pada masa akhir pemerintahannya, kebijakan ini menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19 yang berakibat pada penurunan ekonomi sehingga kebijakan Presiden Trump dianggap gagal. Kegagalan Presiden Trump ini terlihat dimana kurangnya fasilitas kesehatan, pengangguran meningkat, pemangkasan anggaran keamanan selama bertahun-tahun, hingga gagal membantu negara-negara bagian dan usaha kecil masyarakat Amerika Serikat (Zamarripa, 2020). Hal ini terlihat dalam data OECD di bawah yang menyajikan tingkat pengangguran yang

tinggi di Amerika Serikat dibandingkan dengan negara lain dalam kurun waktu yang sama. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Amerika Serikat menjadi negara dengan tingkat pengangguran yang paling tinggi.

Kondisi tersebut berdampak pada pemilihan presiden selanjutnya, dimana Presiden Biden berhasil memenangkan dan meyakinkan masyarakat Amerika Serikat dalam pemilihan presiden saat itu. Dalam kampanye pemilihan presiden 2020, Presiden Biden menyuarakan akan pentingnya 100 hari pertama masa kepresidenan Amerika karena ini berkaitan dengan menentukan arah dan juga tentang menyelesaikan berbagai hal. Mengutip pernyataan Presiden Biden yang dilansir oleh CNN, Presiden Biden menyampaikan pesan yang jelas dan tegas bahwa era isolasionisme “*America First*” yang dikembangkan oleh Donald Trump telah berakhir, “Amerika telah kembali” dan “diplomasi telah kembali” (Dewan & Luke, 2021). Dengan ini Presiden Biden dengan tegas akan mengakhiri era proteksionisme “*America Frist*” yang diterapkan oleh Presiden Trump. Ekspektasi publik dan dunia internasional mengarah pada janji Presiden Biden akan perubahan dalam kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Meski demikian pada masa pemerintahannya, Presiden Biden memutuskan untuk melanjutkan beberapa elemen proteksionis dari kebijakan ekonomi “*America First*” dan keberlanjutan ini semakin jelas setelah satu tahun menjabat. Hal ini terlihat dalam *National Security Strategy* Presiden Biden, yang menekankan fokus Amerika Serikat untuk meningkatkan ekonomi global, mengurangi harga konsumen, dan meningkatkan akses ke pasar, meningkatkan ekspor dan menciptakan lapangan kerja bagi warga negara Amerika Serikat (Biden, 2022). Keberlanjutan ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih diplomatis, namun, data

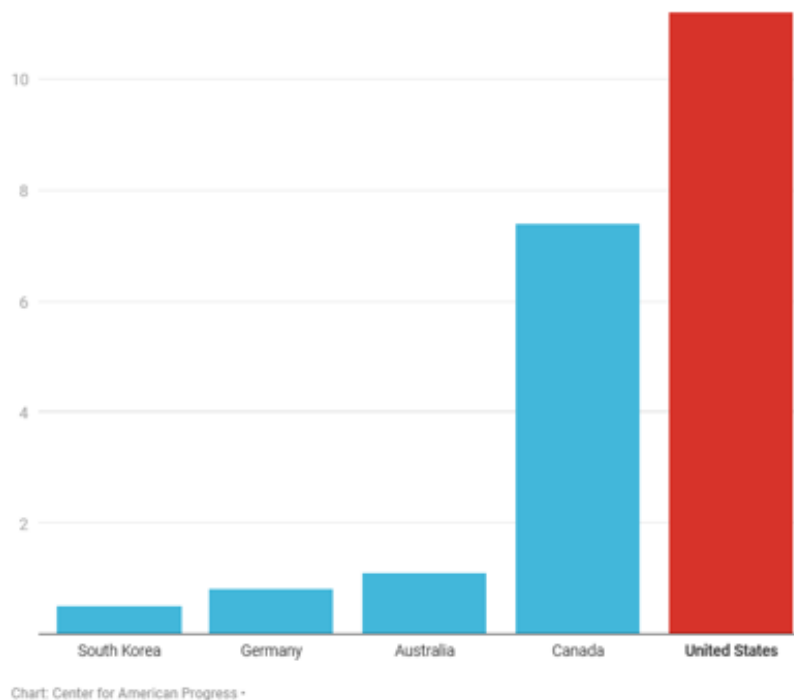
dari CBP menunjukkan bahwa keputusan Presiden Biden ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi impor karena berbanding terbalik dengan fokus Presiden Biden dalam *National Security Strategy*. Hal ini dapat terlihat dalam tabel berikut :

Gambar 2, ini menunjukkan total impor Amerika Serikat yang mengalami peningkatan pada tahun ke tahun pada masa pemerintahan Presiden Biden (CBP, 2025). Setelah satu tahun pertama Presiden Biden memerintah, perhatian akan kebijakan ekonomi Biden mulai banyak yang mengkritik Presiden Biden terkait keputusannya dalam mengambil kebijakan.

Beberapa literature mengatakan kebijakan perdagangan Presiden Biden bisa dikatakan tidak berbeda dari kebijakan perdagangan Presiden Trump, mereka mengandalkan langkah-langkah unilateral dan proteksionisme yang lebih

luas. Presiden Biden tidak hanya mengandalkan kebijakan proteksionisme tersebut, tetapi justru mengembangkannya lebih jauh. Sehingga dapat analisis lebih dalam mengenai efektivitas Pendekatan Proteksionisme yang lebih Diplomatis pada Era Presiden Biden. Dengan mengisi celah-celah dari penelitian terdahulu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literature kebijakan perdagangan internasional dan ekonomi politik Amerika Serikat, khususnya dalam memahami keberlanjutan kebijakan America First pada era Presiden Biden dengan berusaha untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan ini, termasuk pertimbangan ekonomi, politik, dan diplomasi, serta untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan proteksionisme yang lebih diplomatis dalam meningkatkan stabilitas ekonomi Amerika Serikat.

**President Trump's handling of the coronavirus led to a spike in the unemployment rate**  
Percentage point change in the unemployment rate from February through April 2020



Sumber: OECD

**Gambar 1**  
**Tingkat Pengangguran di Amerika Serikat Tahun 2020**

**CBP Trade Statistics\***

Imports and Revenue Collection	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025 <sup>1</sup>
Total Import Value for Goods	\$2.42 trillion	\$2.8 trillion	\$3.35 trillion	\$3.32 trillion	\$3.36 trillion	\$1.23 trillion
Total Entry Summaries	32.8 million	36.9 million	39.1 million	36.6 million	38.3 million	13.25 million
Total Section 321 BOL's and Mail (de minimis)	636 million	771.5 million	685.1 million	868.4 million	1.03 billion	467.67 million
Total Duty, Taxes, and Fees Collected*	\$78.8 billion	\$93.8 billion	\$111.8 billion	\$92.3 billion	\$88.07 billion	\$33.67 billion

<sup>1</sup> FY 2025 is updated as of December 31, 2024.

\* Amount includes Estimated and final duties, taxes, and fees paid by the trade community, including adjustments for refunds.

Sumber: CBP, 2025

## Gambar 2 Statistik Perdagangan Amerika Serikat

Tujuan penelitian untuk menganalisis alasan Presiden Biden dalam mengambil keputusan untuk tetap mengimplementasikan kebijakan “*America First*” pada masa kepemimpinannya, khususnya dalam menghadapi ancaman sistem internasional dan kondisi domestik Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori Neoclassical Realism, penelitian ini berupaya memahami bagaimana interaksi dari persepsi elite pemerintahan Presiden Biden melihat ancaman sistem internasional mempengaruhi keputusan kebijakan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi akademis dalam literature hubungan internasional, ekonomi politik serta memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dalam perumusan strategi ekonomi dan perdagangan yang adaptif terhadap dinamika global dan kondisi domestik. Secara signifikan, penelitian ini membantu memahami kesenjangan antara janji politik dan realitas kebijakan, serta membuka ruang diskusi mengenai efektivitas proteksionisme diplomatik dalam menjaga stabilitas ekonomi dan hubungan internasional khususnya Amerika Serikat.

### TINJAUAN PUSTAKA

Setelah satu tahun pertama Presiden Biden memerintah, perhatian akan kebijakan ekonomi Biden mulai banyak yang mempertanyakan. Beberapa literature mengatakan kebijakan perdagangan Presiden Biden bisa dikatakan tidak berbeda dari kebijakan perdagangan Presiden Trump, mereka mengandalkan langkah-langkah unilateral dan proteksionisme yang lebih luas. Presiden Biden tidak hanya mengandalkan Trump, tetapi juga mengembangkannya. Sloan (2020), membandingkan kebijakan Presiden Biden dengan Presiden Trump, mencari apa perbedaan utama yang terlihat dalam masing-masing kebijakan mereka. Stanley lebih berfokus mencari perbedaan dari kebijakan Presiden Trump secara menyeluruh dan memandang bahwa Presiden Biden dipandang lebih “diplomatis” dari pada Presiden Trump.

Hal ini sejalan dengan literature milik Malawer (2022), artikel ini membahas terkait perdagangan Amerika Serikat dengan China dan bagaimana hal ini berhubungan dengan keamanan nasional Amerika Serikat dengan melihat kebijakan yang dipakai oleh Presiden Trump dan juga Biden serta

melihat tantangan-tantangan yang akan di hadapi di masa mendatang. Malawer melihat meski adanya sedikit perbedaan dengan lebih banyak rekonsiliasi dengan Eropa dan organisasi internasional, namun sulit untuk mengidentifikasi perbedaan terkait China, Rusia dan Iran. Malawer berpendapat bahwa pemerintahan Biden belum mengembangkan strategi yang koheren dan berwawasan untuk mengelola hubungan dagang terutama dengan China (Malawer, 2022).

Dalam kebijakan perdagangan internasional Amerika Serikat memang tidak terlepas dengan isu perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang sudah berlangsung sejak 2018. Biscop & Gromyko (2020) menjelaskan bagaimana dampak yang diberikan oleh kebijakan Biden di dunia internasional dengan melihat strategi dari kebijakan luar negeri kebijakan pemerintahan Biden. Dalam artikel ini melihat bahwa pendekatan Biden akan menjadi lebih moderat dengan lebih terbuka dan akan melakukan kerja sama dengan sekutu, termasuk China, namun tidak secara terang-terangan.

Schoenbaum (2024) menjelaskan bahwa dimana Presiden Biden membela kebijakan tariff Trump dan melanjutkan kebijakan perdagangan Presiden Trump sambil melanjutkan permusuhannya terhadap perjanjian perdagangan bebas baru dan sistem perdagangan multilateral. Penambahan Presiden Biden terhadap kebijakan perdagangan Presiden Trump adalah kebijakan industri proteksionis yang berfokus pada subsidi dan slogan “Buy America”. Selain itu dalam artikelnya Schoenbaum tetap melakukan perbandingan dengan kebijakan Presiden Trump dengan menjelaskan akibat langsung dari kebijakan *America First* pada masa pemerintahannya.

Memang pada awalnya Presiden Biden pernah menjanjikan akan adanya perubahan terhadap kebijakan perdagangan Presiden Trump yang “go it alone” dan “my may

or the highway” namun dijelaskan dalam artikelnya James Bacchus (2022) yang melihat bagaimana perubahan Presiden Biden dalam pendekatan kebijakannya, bahwa selama dua tahun pemerintahan Presiden Biden justru merangkul kebijakan Presiden Trump yang dianggap gagal dalam perdagangan. Kebijakan Presiden Biden juga unilateralisme dan proteksionisme namun tanpa gertakan dan kecaman seperti kebijakan Presiden Trump. Dalam artikelnya berfokus membahas hasil dari kebijakan Biden yang relatif sebagian besar sama dengan kebijakan Presiden Trump (Bacchus, 2022).

Sejalan dengan Schoenbaum (2023) dimana tujuh elemen kebijakan perdagangan pemerintahan Presiden Biden meskipun telah dibuat keputusan yang jelas dari kebijakan Presiden Trump dari banyak bidang, namun tidak demikian halnya dalam perdagangan internasional. Schoenbaum berfokus pada bagaimana realita kebijakan Presiden Biden serta dampaknya.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, terdapat celah yang dapat diisi analisis keberlanjutan kebijakan ekonomi *America First* pada pemerintahan Presiden Biden yang dimana pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perbandingan kebijakan atau dampaknya secara umum, tetapi tidak menjelaskan alasan Presiden Biden memilih untuk melanjutkan elemen-elemen tertentu dari kebijakan *America First* pada pemerintahannya, sehingga menarik untuk dianalisis lebih dalam termasuk faktor ekonomi, politik dan diplomasi yang mempengaruhi keputusan ini. Selain itu, dapat dianalisis lebih dalam juga akan pengaruh keberlanjutan kebijakan ekonomi *America First* pada Perekonomian Amerika Serikat, dimana pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada hubungan dengan satu atau dua negara saja, tetapi kurang membahas dampak domestik seperti bagaimana impor dan ekspor Amerika Serikat, apakah mendapat keuntungan atau

tidak dengan diberlakukannya kebijakan ini.

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas pendekatan proteksionis diplomatik selama masa kepresidenan Biden. Dengan mengatasi celah-celah dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur mengenai kebijakan perdagangan internasional dan ekonomi politik Amerika Serikat. Secara khusus, studi ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang keberlanjutan kebijakan “*America First*” selama era Biden. Hal ini akan dicapai dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, termasuk pertimbangan ekonomi, politik, dan diplomatik. Selain itu, studi ini akan mengevaluasi efektivitas pendekatan proteksionis diplomatik yang lebih kuat dalam meningkatkan stabilitas ekonomi Amerika Serikat.

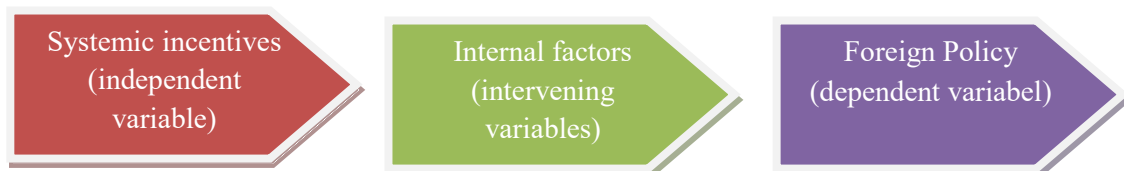
### ***Neoclassical Realism Theory***

Teori *Neoclassical Realism* dikembangkan oleh Gideon Rose menjelaskan terdapat variabel-variabel yang memiliki peran sebagai komponen penting dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Variabel pertama, variabel bebas (*independent variable*) yang terwujud dalam bentuk tekanan internasional. Variabel kedua, variabel penghubung (*intervening variable*) yang dipengaruhi oleh kondisi yang berasal dari dalam suatu negara. Variabel ketiga, variabel terikat (*dependent variable*) yang merupakan

produk kebijakan luar negeri yang dihasilkan melalui gabungan dari kedua variabel lainnya (Rose, 1998).

*Neoclassical Realism* menekankan pada evaluasi hasil kebijakan luar negeri dengan berfokus pada bagaimana variabel sistemik (faktor eksternal) dan domestik (faktor internal) berinteraksi dalam membentuk kebijakan luar negeri. Rose percaya adanya dampak dari sistem internasional terhadap perilaku nasional, karena jika suatu negara memiliki kekuatan yang terbatas dalam sistem internasional maka ambisi kebijakan luar negeri negara tersebut juga akan terbatas, terlepas dari apa yang diinginkan oleh aktor domestik. Sebaliknya, jika negara memiliki kekuatan besar maka analisis kebijakan luar negerinya akan lebih luas (Rose, 1998).

Berdasarkan penjelasan *Neoclassical Realism* menurut pandangan Gideon Rose dalam sub bab sebelumnya, penulis menyajikan operasionalisasi teori tersebut dengan gambar 3. Berdasarkan operasionalisasi teori *Neoclassical Realism* yang digambarkan oleh Gideon Rose tersebut maka model analisa yang dibuat oleh penulis dapat dilihat pada gambar 4. Dengan melihat pandangan dari Gideon Rose, penelitian ini akan menerapkan *Neoclassical Realism* untuk menganalisis melalui variabel sistemik (faktor eksternal) menunjukkan bagaimana Amerika Serikat melihat tekanan dari sistem internasional hingga presiden Biden memutuskan untuk melakukan keberlanjutan terhadap kebijakan *America First* pada pemerintahan



Sumber: Rose, 1998

**Gambar 3**  
**Operasionalisasi Teori oleh Gideon Rose**



Sumber: Rose, 1998

#### Gambar 4

#### Kerangka Analisis dari Penulis berdasar dari Gideon Rose

Presiden Biden. Variabel domestik (faktor internal) dengan melihat dari persepsi Elite Politik akan menunjukkan apa kepentingan serta keinginan presiden Biden dan para pemimpin di Amerika Serikat sehingga memutuskan untuk membuat kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya dengan melakukan keberlanjutan terhadap kebijakan *America First* pada masa pemerintahan Presiden Trump dan dapat terlihat pengaruh dari kebijakan ini terhadap perekonomian Amerika Serikat.

#### METODE PENELITIAN

Dalam melakukan pemahaman berkaitan dengan alasan Presiden Biden melakukan keberlanjutan terhadap kebijakan *America First* pada masa pemerintahannya pada perekonomian Amerika Serikat ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Alan Bryman, penggunaan metode penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk menunjukkan teori melalui pengumpulan dan analisis data. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan melalui beberapa langkah, yang pertama yaitu mengumpulkan data yang relevan, interpretasi data dengan konseptual dan kerja teoritis yang sesuai dan yang terakhir adalah menuliskan temuan atau kesimpulan dalam bentuk narasi (Bryman, 2012).

Metode penelitian kualitatif yang akan digunakan dapat dikategorisasikan sebagai metode penelitian kualitatif eksplanatori, hal ini dijelaskan oleh W. Lawrence Neuman bahwa metode ini dapat dilakukan metode ini dapat dilakukan

dengan mengembangkan penjelasan baru berdasarkan bukti empiris yang sudah ada, ini dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa penelitian terdahulu atau melakukan eksplorasi terhadap teori yang sudah ada untuk diterapkan pada studi kasus. Dengan menjadikan metode ini sebagai dasar analisis Neuman (2014), penelitian ini akan menganalisis alasan Presiden Biden dalam mengambil keputusannya dalam memutuskan kebijakan ekonominya untuk tetap melanjutkan beberapa kebijakan yang sudah ada sebelumnya "*America First*" untuk perekonomian Amerika Serikat dengan menggunakan teori Neoclassical Realism.

Penelitian ini akan menganalisis dengan data yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel media, data resmi dari pemerintah, serta penelitian dahulu. Data yang telah dikumpulkan ini selanjutnya akan dianalisis lebih dalam dengan menggunakan teori *neoclassical realism* untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah diajukan secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut akan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ditemukan untuk memperluas perspektif penulis, mengidentifikasi kebaruan dalam penelitian yang dilakukan, serta menemukan celah penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap perekonomian Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Biden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Systemic Incentives of USA: US-China Trade War & WTO*

Amerika Serikat telah menghadapi beberapa tantangan dari sistem internasional, sehingga Presiden Biden akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sebagian besar kebijakan “*America First*” yang sebelumnya dipimpin oleh Presiden Trump. Meskipun Presiden Biden berjanji pada saat kampanye untuk tidak menggunakan retorika kebijakan yang menghasut seperti yang dilakukan pemerintahan Presiden Trump sebelumnya, namun dalam beberapa aspek, kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya masih berlanjut dan hanya beberapa bagian saja yang dibatalkan. Presiden Biden dinilai tidak hanya mengikuti kebijakan perdagangan Presiden Trump yang gagal, tetapi juga sejauh ini mengabaikan penyebab mendasar dari krisis perdagangan yang menginspirasi perang dagang dan tindakan proteksionisme Presiden Trump. Hal ini dilakukan oleh Presiden Biden karena ancaman dan tantangan dari sistem internasional yang diterima oleh Amerika Serikat khususnya dari China dan kurang efektifnya *World Trade Organization* (WTO). Ancaman yang diberikan oleh China menyangkut beberapa sektor yang menyangkut kebijakan industri negara seperti subsidi, *state-owned enterprises* (SOEs), dan transfer teknologi secara paksa.

Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China bertujuan untuk mengurangi arus perdagangan antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Amerika Serikat telah mengalami defisit perdagangan yang terus meningkat dengan China sejak 1985 dan nilainya mencapai sekitar 420 miliar USD pada tahun 2018. Presiden Trump akhirnya memutuskan untuk memulai perang dagang antara Amerika Serikat sebagai importir terbesar di dunia, dan China

sebagai eksportir terbesar yang dimulai pada Juli 2018 dengan memberlakukan kenaikan tariff besar-besaran pada barang-barang impor China (Jong, 2021). Selain itu, Presiden Trump juga memberlakukan langkah-langkah anti-dumping dan pengamanan pada impor lainnya karena Presiden Trump percaya bahwa produsen asing akan membayar tariff tersebut. Hal ini membuat konsumen Amerika Serikat yang membayarnya dan harga impor lebih tinggi mendorong inflasi konsumen. Perjanjian “*Phase One*” dengan China mengharuskan China untuk meningkatkan investasi yang lebih besar oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, akan tetapi perjanjian ini belum dipenuhi oleh China dan merupakan salah satu warisan yang disayangkan dari perang tariff yang dilakukan oleh Presiden Trump (Malawer, 2022).

Presiden Trump juga menarik diri dari *Trans Pasific Partnership* (TPP) yang dilanjutkan dengan mendeklarasikan perang terhadap *World Trade Organization* (WTO), terutama dengan berfokus dalam sistem penyelesaian sengketa dan badan bandingnya (*Appellate Body*). Presiden Trump memblokir badan banding WTO sehingga sistem penyelesaian sengketa WTO lumpuh. Serangan Presiden Trump ini dinilai tidak biasa karena Amerika Serikat merupakan aktor utama dari sistem perdagangan berbasis aturan, namun serangan ini dan sistem penyelesaian sengketanya berhasil dimenangkan oleh Amerika Serikat dalam dua kasus penting selama masa pemerintahan Presiden Trump. Kasus yang di menangkan oleh Amerika yaitu soal bea masuk panel surya yang diimpor dari China dan kasus lainnya yaitu terkait kuota tariff impor pertanian Amerika Serikat ke China. Presiden Trump juga mengambil banyak tindakan non-tarif, misalnya memasukkan perusahaan China seperti Huawei dan ZTE ke daftar hitam perdagangan Amerika Serikat, sehingga mereka sulit membeli produk dan teknologi

dari Amerika Serikat. Presiden Trump juga menerapkan banyak pembatasan untuk berdagang dengan Iran dan memperketat kontrol perdagangan dengan Kuba. Presiden Trump memberlakukan beberapa sanksi terhadap China dan meningkatkan peninjauan investasi asing ke Amerika Serikat di bawah *Committee on Foreign Investment in the US* (CFIUS) (Malawer, 2022).

Kebijakan perdagangan yang sangat agresif ini dengan mengenakan tariff dan sanksi pada banyak negara, terutama China dengan alasan melindungi ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presiden Trump ini justru memicu kenaikan harga di dalam negeri, memperburuk hubungan dagang internasional, dan menimbulkan banyak sengketa di WTO. Selain itu, kondisi COVID-19 secara global juga mempersempit ruang gerak kebijakan luar Amerika Serikat karena sumber daya harus dialihkan untuk penanganan krisis domestik, Presiden Trump dinilai gagal dalam menghadapi kondisi ini sehingga COVID-19 disebut sebagai salah satu penyebab utama “*scarcity*” atau kelangkaan yang dihadapi oleh dunia termasuk Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Biden. Pandemi COVID-19 yang terjadi ini secara tidak langsung mengganggu perdagangan dan rantai pasok global (Biscop & Gromyko, 2020). Banyaknya ancaman dari sistem internasional seperti tekanan dari China serta ketidakpastian di WTO yang harus dihadapi, membuat Presiden Biden akhirnya memilih berfokus dalam pemulihan perekonomian Amerika Serikat dengan mempertahankan beberapa kebijakan “*America First*” Presiden Trump.

#### ***Analisis Internal Factors: Elite Perceptions of USA to Face Threat from the System International***

Kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya terpengaruh dari faktor eksternal

saja, pemimpin negara akan tetap mempertimbangkan kondisi domestik di negaranya namun tetap disesuaikan dengan kondisi sistem internasional yang sedang terjadi. Dalam aspek ekonomi politik, pemimpin negara akan melihat kondisi sistem internasional yang dinilai menjadi sebuah ancaman untuk memperkuat negaranya. Dalam memahami kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu ancaman dari eksternal, pada bagian ini akan berfokus pada persepsi elite yaitu Presiden Joe Biden yang memegang kekuasaan tertinggi serta persepsi dari elit politik yaitu partai demokrat dan partai republik.

Setelah masa pemerintahan Presiden Trump ini, para elit politik di Amerika Serikat baik dari partai Demokrat maupun Republik semakin meragukan manfaat dari perdagangan bebas tanpa batas karena banyaknya ancaman dari sistem internasional ini. Dominasi ekonomi dari China, perdagangan yang dianggap tidak adil dari WTO ini dipandang sebagai ancaman utama bagi ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat. Rapuhnya rantai pasok saat pandemi COVID-19 terjadi juga memperkuat para elit memiliki persepsi yang kurang akan liberalisasi perdagangan karena tidak terkendali dan beresiko bagi kepentingan nasional Amerika Serikat. Baik dari Demokrat maupun Republik kini lebih sensitif dan berfokus kepentingan domestik karena gagalnya Presiden Trump pada 2020 terjadinya kenaikan pengangguran di Amerika Serikat sehingga Presiden Biden memastikan perlindungan bagi para pekerja. Elit politik dari kedua partai kini memandang kebijakan perdagangan harus lebih selektif, strategis, dan mendukung kepentingan nasional serta geopolitik terutama dalam menghadapi ancaman dari sistem internasional (Bacchus, 2022).

Meski dalam masa kampanye Biden mengkritik kebijakan Presiden Trump yang proteksionis dalam perdagangan

serta berjanji akan adanya perubahan dengan memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan negara-negara sekutu namun, sama seperti Presiden Trump, melihat China sebagai ancaman utama dalam persaingan ekonomi dan teknologi global. Sehingga Presiden Biden menggunakan perdagangan ini sebagai alat geopolitik, bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Selain itu, Presiden Biden dan perdana menteri menilai bahwa liberalisasi perdagangan yang terlalu bebas membuat rantai pasok global menjadi rapuh, hilangnya lapangan kerja dan lemahnya industri dalam negeri, sehingga Presiden Biden pada akhirnya lebih memilih untuk berhati-hati dan cenderung menerpakan proteksionisme yang tidak terlalu agresif atau sering disebut sebagai “*polite protectionism*” (Bacchus, 2022).

Presiden Biden dinilai cenderung melakukan *polite protectionism* ini untuk mendapat dukungan bipartisan dan tidak menimbulkan resistensi di pemerintahan. Penggunaan “*free trade*” yang sekarang lagi diragukan oleh kedua partai besar di Amerika Serikat ini bisa menjadi asset politik bagi Presiden Biden dengan memanfaatkan situasi ini untuk tetap bertahan dan menjadi salah satu alasan Presiden Biden mempertahankan beberapa kebijakan Presiden Trump.

#### **Analisis Foreign Policy: Continuity Kebijakan America First**

Sejak awal Presiden Biden memimpin Amerika Serikat hingga satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Biden terlihat hampir tidak mengubah kebijakan perdagangan Presiden Trump dan terlihat adanya *keberlanjutan* terhadap kebijakan America First pada pemerintahannya. Salah satu tindakan pertama Presiden Biden sehubungan dengan perdagangan internasional adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Trump yaitu mengeluarkan *executive order* yang

menetapkan “*Buy America*” oleh badan pemerintah federal. Buy America ini merupakan kebijakan yang mengharuskan pemerintah Amerika Serikat membeli barang-barang yang diproduksi di dalam negeri untuk mendukung industri lokal dan menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat (Schoenbaum, 2023).

Terdapat dua undang-undang yang mengatur mengenai transaksi impor produk dari luar negeri yaitu “*Buy American Act* (BAA)”, secara umum mewajibkan barang yang dibeli pemerintah harus dibuat di Amerika Serikat, dengan minimal 50% biaya komponen berasal dari Amerika Serikat. BAA dapat mengizinkan mengizinkan pembelian barang luar negeri apabila biaya barang Amerika Serikat dianggap terlalu mahal. Selain itu ada “*Trade Agreements Act* (TAA)” yang mengatur agar negara-negara yang menandatangani perjanjian perdagangan Amerika Serikat mendapat perlakuan yang adil dalam pengadaan pemerintah. TAA memberikan pengecualian untuk negara yang sudah menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dalam perdagangan. Dalam masa pemerintahan era Presiden Biden kebijakan “*Buy America*” ini diperketat dengan meningkatkan persyaratan kandungan dalam negeri dari 50% menjadi 75%, tetapi untuk produk besi dan baja harus lebih tinggi lagi persyaratan kandungan dalam negerinya. Jika barang dalam negeri tidak termurah, maka harga barang asing akan “dinaikkan” secara artifisial sebesar 20% hingga 30% dalam perhitungan supaya barang dalam negeri tetap lebih kompetitif). Standar “*Buy America*” yang baru ini merupakan upaya proteksionisme oleh Presiden Biden. Namun kebijakan ini dikritik oleh mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat yaitu Larry Summers karena dinilai akan memperburuk masalah ekonomi dengan menaikkan harga-harga dan memicu kelangkaan tenaga kerja (Schoenbaum, 2023).

Untuk menghadapi ancaman yang didapat dari China, Presiden Biden tetap meneruskan kebijakan tariff dari Presiden Trump walaupun banyak pihak yang menilai gagal tetapi Presiden Biden tetap mempertahankan hamper semua kebijakan tariff di era Presiden Trump. Kebijakan tariff terhadap produk China tetap diberlakukan, serta kebijakan tariff baja dan aluminium juga tetap berlaku. Selain untuk menghadapi ancaman dari China, Presiden Biden melakukan ini untuk fokus pada “*worker-centered trade policy*” yang mengutamakan pekerja Amerika Serikat.

Sikap Presiden Biden terhadap kebijakan tariff ini memang berbeda dari Presiden Trump yang keras, konfrontatif dan anti multilateral, sebaliknya Presiden Biden dinilai lebih lembut dan menunjukkan mendukung multilateral meski hanya “*lip service*” dan tetap melanjutkan polite protectionismnya. Selain itu, Presiden Biden juga dianggap hanya *lip service* atau sekadar ucapan pada janjinya untuk memperbaiki hubungan Amerika Serikat dengan WTO. Boikot terhadap *Appellate Body* masih berlanjut dan Presiden Biden memiliki fokus utama terhadap kepentingan domestiknya. Presiden Biden dinilai belum benar-benar memperbaiki hubungan Amerika Serikat dengan WTO dan melakukan hubungan multilateral. Meskipun demikian, Presiden Biden berhasil membuat Amerika Serikat untuk bergabung kembali dengan *World Health Organization* dan *the Paris Climate Accord* (Schoenbaum, 2023). Selain itu, Presiden Biden juga berhasil merevitalisasi hubungan dengan berbagai negara melalui pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin dari Afrika, Amerika, dan Asia. Presiden Biden berhasil memperkuat dan memperluas NATO dan membantu memulihkan G7 sebagai respon tantangan internasional yang dihadapi sejak menjabat. Di Indo-Pasifik, diplomasi Presiden Biden telah membuat Amerika menjadi lebih

aman dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh China. Presiden Biden juga memperdalam hubungannya dengan Australia dan Inggris lewat AUKUS untuk mendorong kerja sama pertahanan dan ekonomi Amerika Serikat (House, 2025).

Presiden Biden juga aktif menggunakan sanksi untuk menanggapi pelanggaran HAM yang terjadi dan korupsi bahkan di luar Amerika Serikat. Presiden Biden mendorong untuk menyelaraskan kebijakan ekspor guna menghadapi pelanggaran HAM dan memperketat hukum Amerika Serikat dibanding era Presiden Trump dahulu. Sanksi baru dijatuhkan pada China (kasus pelanggaran HAM terkait Uighur), Myanmar, Rusia, Kuba dan Kamboja. Pada 2021 Presiden Biden menandatangani UU baru yang memperketat standar impor untuk produk di wilayah Xinjiang di China karena isu HAM. Hal ini dilakukan untuk kepentingan politik dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Keberlanjutan Kebijakan Ekonomi “*America First*” pada pemerintahan Presiden Biden ini lebih terlihat dalam hal tariff dan proteksionismenya, Presiden Biden lebih menekankan 5 pilar utama yaitu *Empowering Workers, Making and Building It in America, Giving Families Breathing Room, Making American Industry More Competitive, Less Concentrated, and More Resilient*, dan pilar terakhir adalah *Rewarding Work, Not Wealth*. Kelima pilar ini berfokus pada pemulihan dan transformasi ekonomi Amerika Serikat agar pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu (Schoenbaum, 2023; Steinberg & Tan, 2023; Zahoor et al., 2023). Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden Biden untuk melakukan *polite protectionism* dalam kebijakannya. Meski banyak yang menilai akan gagal seperti Presiden Trump, banyak pihak meminta perubahan terhadap kebijakan ini karena hasilnya masih belum terlihat hingga data

yang diberikan oleh CBP impor semakin naik, pemerintah serta Presiden Biden berpendapat dalam laporan “*The Biden-Harris Economic Blueprint*” bahwa akan membutuhkan waktu dan masih banyak yang harus dilakukan untuk mendukung transisi ekonomi Amerika Serikat untuk menuju pertumbuhan yang stabil maka hal ini dilakukan sebagai pondasi untuk mulai menangani tantangan-tantangan ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa tahun ini (House, 2022).

Meskipun demikian, Pemerintahan Presiden Biden berhasil dalam pemulihan lapangan kerja dengan menekan angka pengangguran hingga di bawah 4% selama 28 bulan dan menciptakan 16,6 juta lapangan kerja sejak Presiden Biden menjabat dengan program yang direncanakannya yaitu “*American Rescue Plan (ARP)*”. ARP juga mendorong investasi terbesar dalam upaya mencegah kekerasan dan berinvestasi untuk keamanan masyarakat Amerika Serikat. Berkat pendanaan yang dialokasikan Presiden Biden untuk di dalam negeri, pada tahun 2023 menjadi salah satu tingkat kejahatan terendah dalam 50 tahun terakhir (Spadafora, 2023; Taylor, 2022). Presiden Biden juga berhasil meningkatkan bisnis kecil yang terbesar dalam sejarah dengan rekor 21 juta aplikasi bisnis baru selama tiga tahun terakhir hal ini meningkat 55% dari tahun sebelum terjadinya pandemic COVID-19 (House, 2025).

Bisnis kecil yang dikembangkan pada tahun pertama di bawah Presiden Biden, pemerintah federal memberikan lebih dari 450 miliar USD dalam bentuk dana darurat kepada lebih dari 6 juta usaha kecil, membantu mereka tetap buka selama pandemi. Selain itu, Presiden Biden percaya bahwa perusahaan-perusahaan besar harus membayar pajak secara adil, dan mereka berkomitmen untuk membalikkan pemberian pajak besar-besaran yang diberlakukan oleh Partai Republik pada tahun 2017. Pajak minimum perusahaan

dalam *Inflation Reduction Act* memastikan bahwa perusahaan-perusahaan bernilai miliaran dolar membayar setidaknya 15% dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak (House, 2025).

*Buy American Act* membantu memastikan uang pajak Amerika untuk mendukung lapangan kerja dan bisnis di Amerika Serikat. Presiden Biden membuat kebijakan “*Made in America*” ini sebagai bentuk dukungannya terhadap perusahaan-perusahaan lokal dan memprioritaskan manufaktur dalam negeri. Presiden Biden berhasil menerapkan perubahan paling kuat pada *Buy American Act* dalam hamper 70 tahun terakhir. Sejak saat itu, Amerika Serikat telah menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru di bidang manufaktur dan konstruksi serta ratusan miliar investasi (House, 2025).

## SIMPULAN

Keberlanjutan kebijakan ekonomi “*America First*” yang dilakukan oleh Presiden Biden merupakan hasil interaksi antara ancaman sistem internasional dan kondisi domestik Amerika Serikat. Meskipun dalam kampanyenya Presiden Biden menjanjikan adanya perubahan terhadap kebijakan proteksionis era Presiden Trump dan berkomitmen memperkuat sistem perdagangan multilateral, pada kenyataannya ada beberapa elemen proteksionisme yang dipertahankan oleh Presiden Biden dengan lebih diplomatis atau biasa disebut “*polite protectionism*”. Dalam melihat ancaman sistem internasional terlihat adanya persaingan global, terutama dengan China, serta dinamika geopolitik yang menuntut Amerika Serikat untuk tetap menjaga kepentingan nasional dan daya saing ekonominya. Faktor internal berupa kebutuhan untuk melindungi industri domestik, menjaga kestabilan ekonomi pasca pandemi, serta memenuhi ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha dalam negeri, membuat Presiden Biden pada

akhirnya memutuskan untuk melakukan *polite protectionis* sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan politik di tengah ketidakpastian global. Hal ini dilakukan juga untuk mendapat dukungan bipartisan dan tidak menimbulkan resistensi di pemerintahan. Presiden Biden berupaya menampilkan citra yang lebih terbuka dan diplomatis, realitas politik dan ekonomi internasional serta tekanan domestik membuatnya tetap mempertahankan sejumlah elemen proteksionisme yang sudah ada sejak era Trump. Meski banyak dinilai gagal dan tidak ada hasilnya, namun, keberhasilan Presiden Biden juga terlihat dalam lapo-rannya terutama dalam fokusnya untuk pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Presiden Biden juga berhasil melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk membantu menghadapi ancaman interna-sional terutama dalam menghadapi China, walaupun hubungan dengan WTO masih belum terlihat adanya perubahan sejak Presiden Trump. Penerapan teori *Neoclassical Realism* dari Gideon Rose dalam penelitian ini terbukti relevan untuk memahami bagaimana interaksi antara faktor eksternal dan internal membentuk keputusan kebijakan luar negeri. Hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya memahami konteks domestik dan internasional secara bersamaan, karena keduanya saling memengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini menjadi pengingat bahwa janji politik sering kali harus berhadapan dengan realitas sistem internasional dan kebutuhan domestik yang kompleks dan membuka ruang untuk studi lebih lanjut mengenai efektivitas proteksionisme diplomatis dan dampaknya terhadap perekonomian domestik serta hubungan Amerika Serikat dengan negara lain. Refleksi lebih lanjut mengarah pada kompleksitas faktor domestik dan ancaman sistem internasional membuat sulit untuk melakukan perubahan yang signifikan

terhadap kebijakan proteksionis, fokus terhadap kepentingan nasional merupakan pilihan yang tepat karena janji kampanye yang idealis tetap harus disesuaikan dengan realitas politik dan ekonomi yang kompleks. *Polite protectionism* ini terlihat lebih diterima secara internasional dan mengurangi ketengangan dengan beberapa negara, meskipun belum dapat seutuhnya terbilang janji multilateralismnya tercapai. Sehingga efektivitas pendekatan ini dalam mencapai ekonomi dan politik masih perlu dievaluasi secara berkelanjutan serta komunikasi yang baik terhadap publik dan internasional sangat penting agar ekspektasi dapat diterima dengan tepat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bacchus, J. (2022). *Biden and Trade at Year One The Reign of Polite Protectionism*. Cato Institute.
- Biden, P. J. (2022). *National Security Strategy*. The White House.
- Biscop, S., & Gromyko, A. (Eds.). (2020). *Biden's World?: Views from the United States, China, Russia, and the European Union*. Egmont Institute.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods 4th Edition*. Oxford University Press.
- CBP. (2025). *Trade Statistics*. Retrieved from The U.S. Department of Homeland Security: <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/trade>.
- House, T. W. (2022). *The Biden-Harris Economic Blueprint*. The White House.
- Jong, H. Y. (2021). The Art of Trade War: Spurring Investments in Indonesia amidst the US-China Trade War. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 14(2), 204-221.

- Malawer, S. S. (2022). *Biden's Trade Policies-Year One: Same as Trump's or More Aggressive?* China & WTO Review.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Pearson Education Limited.
- Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. *World Politics*, 51(1). 144–172.
- Schoenbaum, T. J. (2023). The Biden Administration's Trade Policy: Promise and Reality. *German Law Journal*, 22. 102-124.
- Schoenbaum, T. J. (2024). *Bidenomics Versus Maganomics on Trade Law: Pick Your Poison*. Institute for European Policymaking (IEP)@BU Policy Brief.
- Sloan, S. R. (2020). US Foreign Policy in 2021: Biden or Trump and the rest of the world. *Atlantisch Perspectief*, 44(5). 38-43.
- Trump, P. D. (2017). *National Security Strategy of the United States of America*. The White House.
- Schoenbaum, T. J. (2023). The Biden Administration's Trade Policy: Promise and Reality. *German Law Journal*, 24(1), 102–124. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.7>.
- Spadafora, F. (2023). U.S. Unemployment insurance through the Covid-19 crisis. *Journal of Government and Economics*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2023.100069>.
- Steinberg, D. A., & Tan, Y. (2023). Public responses to foreign protectionism: Evidence from the US-China trade war. *The Review of International Organizations*, 18(1), 145–167.
- Taylor, J. B. (2022). The effect of the rescue plans and the need for policies to increase economic growth. *Journal of Policy Modeling*, 44(4), 768–779. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2022.09.004>.
- Zahoor, N., Wu, J., Khan, H., & Khan, Z. (2023). De-globalization, International Trade Protectionism, and the Reconfigurations of Global Value Chains. *Management International Review*, 63(5), 823–859. <https://doi.org/10.1007/s11575-023-00522-4>.
- Dewan, A., & Luke, M. (2021, April 28). *Biden says 'America Is Back,' but 'America First' has haunted his first 100 days*. Retrieved from CNN World: <https://edition.cnn.com/2021/04/28/world/biden-100-days-foreign-policy-intl/index.html>.
- House, T. W. (2025). *Economy: Historically Strong and Broadly Shared Recovery*. The Official Biden-Harris Administration Policy Record: <https://bidenwhitehouse.archives.gov/issues/>.
- Zamarripa, R. (2020). *5 Ways the Trump Administration's Policy Failures Compounded the Coronavirus-Induced Economic Crisis*. The Center for American Progress: <https://www.americanprogress.org/article/5-ways-trump-administrations-policy-failures-compounded-coronavirus-induced-economic-crisis/>.